

Government Policy in Tackling Unemployment

Andy Tonggo Michael Sihombing^{1*}, Rolib Sitorus²
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Corresponding Author: Andy Tonggo Michael Sihombing
mike281183@yahoo.com

ARTICLE INFO

Keywords : Policy, Regulation, Government, Unemployment, Job Opportunities

Received : 05 June

Revised : 25 June

Accepted: 28 July

©2024 Sihombing, Sitorus:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Unemployment is one of the serious and complex economic problems, which affects the welfare of individuals and the social stability of a country. To overcome this challenge, governments often implement various policies aimed at reducing unemployment rates. These policies can be divided into three main categories: macroeconomic policies, labor market policies, and training and education policies. Based on these things, this paper is conducted to determine the impacts arising from the effects of unemployment, and to determine government policies in overcoming unemployment. This paper is carried out by collecting materials using library research methods and tracing various sources of literature on policies taken by the government. While the results obtained in this paper are the impacts arising from the effects of unemployment on individuals, namely financial difficulties, stress and mental health problems, decreased self-confidence and decreased skills; on society, namely increased inequality, decreased quality of life; on the economy, namely decreased consumption, decreased tax revenues, increased social and health costs, and government policies in overcoming unemployment in various fields including fiscal and monetary policies, increasing foreign investment, investment promotion, trade and industrial policies, developing SMEs, developing the tourism sector and indigenous Indonesian culture, providing guarantees for workers whose employment is terminated (PHK), employment policies.

Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran

Andy Tonggo Michael Sihombing^{1*}, Rolib Sitorus²

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Corresponding Author: Andy Tonggo Michael Sihombing

mike281183@yahoo.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kebijakan, Regulasi, Pemerintahan, Pengangguran, Kesempatan Kerja

Received : 05 Juni

Revised : 25 Juni

Accepted: 28 Juli

©2024 Sihombing, Sitorus:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang serius dan kompleks, yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan stabilitas sosial suatu negara. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah sering kali mengimplementasikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: kebijakan makroekonomi, kebijakan pasar tenaga kerja, dan kebijakan pelatihan serta pendidikan. Berdasarkan hal-hal tersebut penulisan ini dilakukan untuk Untuk mengetahui dampak yang timbul dari akibat terjadinya pengangguran, dan Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Dalam penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan menelusuri berbagai sumber kepustakaan mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sedangkan hasil yang didapatkan dalam penulisan ini adalah Dampak yang timbul dari akibat terjadinya pengangguran adalah pada individu yaitu terjadinya kesulitan keuangan, stres dan masalah kesehatan mental, penurunan kepercayaan diri dan penurunan keterampilan; pada masyarakat yaitu peningkatan ketidaksetaraan, penurunan kualitas hidup; pada perekonomian yaitu penurunan konsumsi, penurunan penerimaan pajak, peningkatan biaya sosial dan kesehatan, serta Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di berbagai bidang antara lain kebijakan fiskal dan moneter, peningkatan investasi asing, promosi investasi, kebijakan perdagangan dan industri, pengembangan UKM, pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan asli Indonesia, pemberian jaminan terhadap tenagakerjaan yang diputuskan hubungan kerjanya (PHK), kebijakan ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

Hampir di semua negara memiliki masalah pengangguran dan ini menjadi salah satu masalah utama pada negara-negara tersebut, seperti juga di Indonesia dan hal ini dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengangguran memiliki arti tidak melakukan sesuatu atau keadaan menganggur atau tidak bekerja dan biasanya pengangguran sering dikaitkan dengan terbatasnya kesempatan kerja dan kualitas pendidikan.

Pengangguran merupakan seseorang yang sudah masuk usia produktif bekerja dan memiliki keinginan untuk bekerja, akan tetapi belum menemukan pekerjaan. Usia produktif bekerja dimulai dari usia 15-64 tahun, namun tidak semua usia 15-64 tahun termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat pengangguran dihitung dengan membagi jumlah orang yang menganggur dengan jumlah total orang produktif bekerja.

Pengangguran ini bukan hanya terkait pada orang yang belum mempunyai pekerjaan, tetapi juga dapat mencakup pencari kerja dan orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak produktif, sehingga dapat digolongkan sebagai pengangguran.

TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu ahli bernama Sukirno berpendapat bahwa pengangguran adalah orang-orang di dunia ekonomi yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil memperoleh pekerjaan. Sementara itu, Nanga menyatakan bahwa pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang tidak termasuk dalam produktif bekerja, tidak bekerja dan tidak aktif mencari pekerjaan pada saat itu.

Adapun pengangguran dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, sebagai berikut:

1. Pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya:
 - a) Pengangguran musiman adalah pengangguran yang timbul ketika adanya pergantian musim yang terjadi karena adanya jeda kerja saat ada pergantian musim. Umumnya sering ditemukan pada orang yang bekerja untuk memanen di pertanian, mereka akan menganggur setelah selesai musim panen.
 - b) Pengangguran siklis adalah pengangguran yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya pemecatan atau PHK;
 - c) Pengangguran deflasi adalah pengangguran yang timbul karena jumlah pekerja lebih banyak daripada pekerjaan terbuka (lowongan kerja);
 - d) Pengangguran voluntary adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang tidak mau bekerja walaupun masih mampu bekerja;
 - e) Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh struktur sektor ekonomi dalam suatu negara berubah;
 - f) Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang menyebabkan pengusaha lebih menyukai penggunaan mesin yang lebih canggih dan murah daripada menggunakan tenaga manusia;

- g) Pengangguran friksional adalah pengangguran yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja yang tersedia.
2. Pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja:
- a) Pengangguran terbuka.
Pengangguran terbuka adalah keadaan di mana seseorang tidak bekerja sama sekali dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Hal ini dikarenakan lapangan kerja di negara tersebut tidak tersedia atau kegagalan negara tersebut untuk bekerja sama dengan negara asing dalam pengiriman tenaga kerja keluar negeri. Selain itu, pengangguran terbuka juga disebabkan oleh ketidaksesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan latar belakang pendidikan peminat kerja. Pengangguran terbuka juga dapat disebabkan karena seseorang tidak mau bekerja.
- b) Setengah menganggur
Setengah menganggur adalah keadaan di mana seseorang bekerja tetapi tenaganya tidak terpakai dan tidak diukur dengan jam kerja. Setengah menganggur juga dapat berarti bahwa seseorang bekerja tetapi tidak bekerja secara produktif dan pekerjaannya dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Sebagai contoh, sebagai seorang freelancer biasanya tidak menetapkan waktu kapan mereka bekerja dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan bekerja pada waktu-waktu tertentu.
- c) Pengangguran terselubung
Pengangguran terselubung adalah terjadinya pengangguran yang diakibatkan seseorang tidak dapat bekerja secara maksimal atau optimal. Pengangguran terselubung disebabkan oleh ketidakcocokan antara tenaga kerja dengan keterampilan tenaga kerja itu. Ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan berujung pada penurunan pendapatan. Misalnya, ada seorang perawat lulusan D3 yang bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan. Perawat D3 ini kemudian tidak dapat melakukan tugas-tugas kesekretariatan yang seharusnya dipahami oleh seorang sekretaris sehingga terjadi penghambatan kerja.

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu:

1. Siklus Ekonomi: Ketika ekonomi mengalami perlambatan atau resesi, perusahaan cenderung mengurangi produksi dan memotong tenaga kerja untuk mengurangi biaya. Ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran.
2. Kesenjangan antara Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja: Jika jumlah pencari kerja (penawaran tenaga kerja) melebihi jumlah pekerjaan yang tersedia (permintaan tenaga kerja), maka akan terjadi pengangguran. Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dan kebutuhan pasar kerja juga dapat menyebabkan kesenjangan ini.
3. Perubahan Struktural: Perubahan dalam struktur ekonomi, seperti perubahan teknologi, globalisasi, dan perubahan preferensi konsumen, dapat

- menyebabkan pergeseran dalam jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Jika pekerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai atau terlatih untuk pekerjaan baru ini, mereka mungkin mengalami pengangguran struktural.
4. Keterampilan dan Pendidikan: Ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dapat menyebabkan pengangguran. Kurangnya pendidikan, pelatihan yang tidak memadai, atau keterampilan yang tidak relevan dalam lingkungan kerja saat ini dapat membuat pencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan.
 5. Mobilitas Tenaga Kerja: Ketidakcocokan geografis antara pencari kerja dan pekerjaan yang tersedia juga dapat menyebabkan pengangguran. Jika pekerja tidak bersedia atau tidak dapat berpindah ke daerah di mana pekerjaan tersedia, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam menemukan pekerjaan.
 6. Faktor Demografis: Faktor-faktor demografis, seperti pertumbuhan populasi, perubahan struktur usia, dan partisipasi tenaga kerja wanita, juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Misalnya, jika jumlah pemuda yang masuk ke pasar tenaga kerja melebihi jumlah pekerjaan yang tersedia, tingkat pengangguran bisa meningkat.
 7. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan ekonomi, peraturan ketenagakerjaan, dan kebijakan fiskal, juga dapat berdampak pada tingkat pengangguran. Kebijakan yang tidak tepat atau tidak efektif dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru atau dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, berikut ini adalah beberapa permasalahan yang muncul, yaitu:

1. Bagaimana dampak yang timbul dari akibat terjadinya pengangguran?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran?

Sedangkan tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab permasalahan tersebut di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak yang timbul dari akibat terjadinya pengangguran.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran.

METODOLOGI

Penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan menelusuri berbagai sumber kepustakaan mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran di Indonesia sampai dengan berbagai regulasi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam masa kepemimpinan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla dan masa kepemimpinan kedua oleh Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin. Penelitian kepustakaan ini adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang

dimulai secara analisa terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada periode 2020 - 2024 berkaitan dengan regulasi serta langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Penelitian yang dilakukan terhadap sumber-sumber kepustakaan baik berupa bahan-bahan buku, surat kabar, jurnal-jurnal dan utamanya sumber *online* yang diakses melalui internet menjadi metode yang digunakan penulisan dalam menyusun tulisan ini. Setelah tulisan ini disusun maka kemudian dilakukan revisi-revisi untuk menyesuaikan maksud dan makna yang terkandung di dalamnya sehingga dapat disajikan dalam publikasi kali ini yang dilakukan pasca Pandemi Covid-19.

Pendekatan kepustakaan adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dalam tulisan ini yang dikombinasikan dengan analisa-analisa terhadap bahan-bahan yang tersaji secara online di berbagai media internet baik yang disajikan oleh pemerintah, lembaga non pemerintahan, dan lain-lain.

Penelitian kepustakaan sebagaimana disajikan dalam buku-buku tentang Metodologi Penelitian Hukum dikemukakan bahwa penelitian kepustakaan tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian yang hanya mendasarkan bahan-bahan kepada materi yang tersaji secara online atau materi dalam buku-buku, jurnal dan lain-lain, akan tetapi penulis juga memberikan tanggapan ataupun gagasan dalam melakukan penelitian untuk penyusunan sehingga dapat diperoleh tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam rumusan permasalahan di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Yang Timbul Dari Akibat Terjadinya Pengangguran

Pengangguran memiliki dampak yang luas dan serius, baik bagi individu, masyarakat, maupun perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi akibat pengangguran:

1. Dampak pada Individu:

- **Kesulitan Keuangan:** Pengangguran menyebabkan hilangnya sumber pendapatan yang stabil yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan kemungkinan tergelincir ke dalam kemiskinan.
- **Stres dan Masalah Kesehatan Mental:** Ketidakpastian pekerjaan dan tekanan finansial yang terkait dengan pengangguran dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Riset mencatat bahwa pengangguran juga menjadi salah satu faktor fenomena bunuh diri.
- **Penurunan Kepercayaan Diri:** Pengangguran dapat merusak kepercayaan diri dan harga diri seseorang, karena mereka mungkin merasa tidak bernilai atau gagal dalam mencari pekerjaan.

- Penurunan Keterampilan: Ketika seseorang mengalami pengangguran dalam jangka waktu yang lama, mereka mungkin kehilangan keterampilan yang relevan dengan pasar tenaga kerja, yang dapat mempersulit mereka untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan. Semakin berkembangnya zaman, maka keterampilan tenaga kerja yang dicari oleh perusahaan juga ikut meningkat.
2. Dampak pada Masyarakat:
- Peningkatan Ketidaksetaraan: Pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, karena beberapa individu atau kelompok mungkin mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan sementara yang lain mempertahankan atau mendapatkan pekerjaan dengan bayaran tinggi.
 - Penurunan Kualitas Hidup: Pengangguran yang tinggi dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat mengurangi akses terhadap layanan dasar seperti perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan transportasi yang dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dan marginalisasi sosial.
3. Dampak pada Perekonomian:
- Penurunan Konsumsi: Pengangguran dapat mengakibatkan penurunan daya beli individu, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bisnis.
 - Penurunan Penerimaan Pajak: Pengangguran menyebabkan berkurangnya jumlah orang yang membayar pajak penghasilan, yang dapat mengurangi pendapatan pemerintah dan membatasi kemampuan untuk memberikan layanan publik dan investasi dalam pembangunan infrastruktur.
 - Biaya Sosial dan Kesehatan: Pengangguran dapat menghasilkan biaya sosial tambahan seperti tunjangan pengangguran dan program bantuan sosial, serta biaya kesehatan akibat stres, gangguan mental, dan masalah kesehatan lainnya yang terkait dengan pengangguran.

Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran Kebijakan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah

Permasalahan dalam perekonomian makro yang sangat berdampak negatif adalah pengangguran. Tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan untuk mencapai kestabilan ekonomi negara, dengan meningkatnya pengangguran, maka tujuan negara akan terhambat. Alasan banyaknya pengangguran tidak luput dari dalam diri sendiri, banyaknya pengangguran juga bisa karena tidak ada pekerjaan yang cocok, tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan juga malas untuk bekerja dan bergantung kepada orang lain.

Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada pasal 27 ayat 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan". Maka dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahlah yang bertanggung jawab atas pengangguran yang terjadi saat ini.

Berikut ini merupakan kebijakan - kebijakan pemerintah yang dapat mengurangi angka pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Fiskal: Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Ini dapat dilakukan melalui stimulus fiskal, yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah dalam bentuk infrastruktur, program pelatihan kerja, dan insentif pajak bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja baru.
2. Kebijakan Moneter: Otoritas moneter dapat menggunakan kebijakan suku bunga untuk mempengaruhi tingkat pengangguran. Menurunkan suku bunga dapat merangsang investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Peningkatan Investasi Asing: Pemerintah dapat meningkatkan minat investasi asing untuk dalam negeri dengan memberikan kemudahan untuk berinvestasi dan berusaha bagi investor. Dengan meningkatnya investasi dalam negeri, maka lapangan kerja akan otomatis terbuka bagi kalangan masyarakat terutama pengangguran, dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat.
4. Kebijakan Promosi Investasi: Pemerintah dapat mendorong investasi swasta dengan memberikan insentif fiskal, memperbaiki iklim bisnis, dan mengurangi birokrasi. Investasi yang lebih tinggi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Kebijakan Perdagangan dan Industri: Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mendukung sektor-sektor industri yang berpotensi menciptakan lapangan kerja. Ini dapat mencakup perlindungan dan dukungan bagi sektor-sektor yang strategis, promosi ekspor, dan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi dan inovasi.
6. Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): UKM sering kali menjadi sumber penting lapangan kerja. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan insentif kepada UKM melalui pembiayaan yang mudah, akses ke pasar, pelatihan, dan kemitraan dengan perusahaan besar.
7. Pengembangan sektor - sektor pariwisata dan kebudayaan asli Indonesia: Pemerintah dapat menarik perhatian terhadap investor asing dengan mengembangkan sektor - sektor pariwisata dan kebudayaan asli Indonesia yang masih belum tergali potensinya maupun yang sedang berkembang yang membutuhkan perhatian pemerintah. Pemerintah dapat memberikan promosi - promosi terhadap sektor pariwisata dan kebudayaan terhadap dunia luar sehingga ada wisatawan asing yang tertarik untuk mengunjungi daerah tersebut serta pemerintah dapat mengajak investor asing untuk berinvestasi dengan investasi pembangunan ataupun pengembangan pariwisata atau kebudayaan sehingga terbuka lapangan kerja untuk pengangguran.
8. Program Pelatihan dan Ketrampilan: Pemerintah dapat memberikan fasilitas sebuah pelatihan kerja maupun ketrampilan untuk meningkatkan kualitas pekerja yang baik, sehingga tingkat presentase PHK akan menurun, dengan

menurunnya tingkat presentase PHK maka pengangguran juga akan menurun. Program pelatihan ini alangkah baiknya bukan hanya terbuka untuk kalangan pencari kerja saja tetapi juga untuk masyarakat sekitar terutama untuk kalangan mahasiswa/i.

9. Peningkatan Sistem Pendidikan: Pendidikan merupakan sebuah faktor yang dapat meningkatkan dan membentuk sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas bagi bangsa dan negara. Pemerintah dapat membenahi sistem pendidikan dalam negeri dikarenakan jumlah pengangguran terbesar juga merupakan mahasiswa/i dari perguruan tinggi yang masih belum sanggup untuk dan dalam lingkungan pekerjaan. Selain itu, pemerintah bisa memberikan sekolah gratis untuk keluarga yang tidak mampu, karena dengan putusnya pendidikan, maka putus juga pembenahan untuk menjadi sumber daya manusia yang baik.
10. Pemberian Kartu Prakerja bagi pekerja yang telah diputuskan hubungan kerjanya untuk mengembangkan potensi pekerja, meningkatkan produktivitas serta daya saing pekerja tersebut dan mengembangkan kewirausahaan.
11. Pemberian jaminan terhadap tenaga kerja yang diputuskan hubungan kerjanya (PHK): Pemerintah dengan kebijakan seperti BPJS dapat menjamin kehidupan dan kesejahteraan pekerja. Salah satu contohnya adalah BPJS jaminan kehilangan pekerjaan. Hal ini merupakan cerminan dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021. Dengan adanya BPJS jaminan kehilangan pekerjaan, pekerja atau buruh akan menerima manfaat seperti uang tunai, akses informasi kerja dan pelatihan kerja.
12. Kebijakan Ketenagakerjaan: Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan ketenagakerjaan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, termasuk regulasi fleksibilitas ketenagakerjaan yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan ekonomi, dan program subsidi upah untuk pekerja yang kurang terampil.

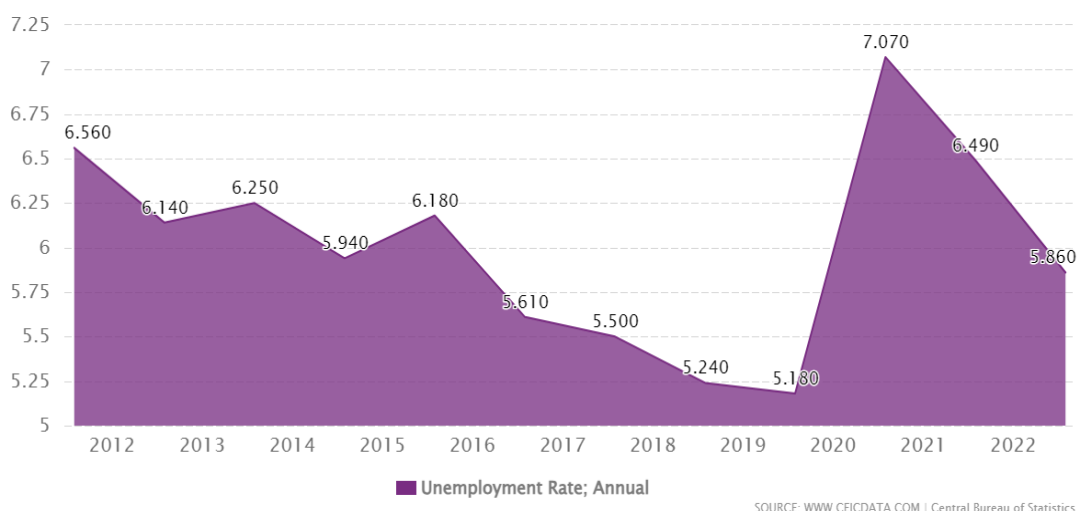
Dampak dari Kebijakan Pemerintah terhadap Pengangguran

Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menekan pengangguran dapat memiliki berbagai dampak positif, antara lain:

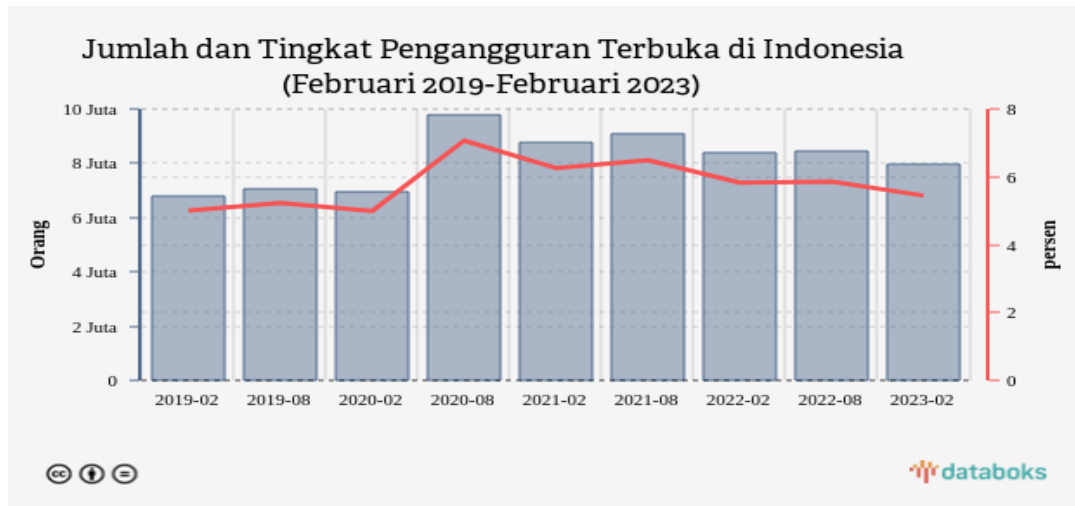
1. Penurunan Tingkat Pengangguran: Kebijakan pemerintah yang efektif dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan peluang kerja baru. Hal ini dapat mengurangi beban ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pengangguran;
2. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan: Dengan adanya lapangan kerja yang lebih banyak, individu dan rumah tangga dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil. Hal ini akan meningkatkan daya beli mereka, memperbaiki kesejahteraan, dan mengurangi tingkat kemiskinan;
3. Peningkatan Konsumsi: Ketika lebih banyak orang memiliki pekerjaan dan pendapatan yang stabil, konsumsi cenderung meningkat. Ini dapat

- mendorong pertumbuhan ekonomi, karena meningkatnya permintaan akan barang dan jasa;
4. Stabilitas Sosial: Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketegangan sosial dan konflik. Dengan menekan pengangguran, kebijakan pemerintah dapat menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik dan mengurangi ketidakpuasan masyarakat;
 5. Peningkatan Produktivitas: Dengan adanya lapangan kerja yang lebih banyak, tenaga kerja akan lebih termanfaatkan dan produktif. Peningkatan produktivitas ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi negara dan memperkuat pertumbuhan jangka panjang;
 6. Pengembangan Keterampilan dan Pendidikan: Kebijakan pemerintah yang mendukung pelatihan keterampilan dan pendidikan dapat meningkatkan kapabilitas tenaga kerja. Ini akan memberikan peluang bagi individu untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik;
 7. Peningkatan Investasi: Kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru dapat meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini dapat mendorong peningkatan investasi dalam berbagai sektor ekonomi, yang pada gilirannya akan menciptakan lebih banyak peluang kerja;
 8. Peningkatan Pendapatan Pajak: Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja, pemerintah akan mengalami peningkatan pendapatan pajak. Pendapatan pajak yang lebih tinggi dapat digunakan untuk membiayai program dan proyek pembangunan, seperti infrastruktur dan layanan publik.

Dampak dari kebijakan - kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran memberikan dampak yang positif, berikut merupakan *chart* angka pengangguran Indonesia dari tahun ke tahun.



Grafik 1. *Chart* Angka Pengangguran Indonesia dari Tahun ke Tahun



Grafik 2. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia (Februari 2019-Februari 2023)

Dapat disimpulkan, bahwa kebijakan - kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran cukup efektif, walaupun angka pengangguran di Indonesia masih tergolong memiliki angka pengangguran yang banyak, tetapi kebijakan pemerintah dapat membantu untuk mengurangi angka pengangguran.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Atas pembahasan yang telah dijelaskan, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dampak yang timbul dari akibat terjadinya pengangguran adalah pada individu yaitu terjadinya kesulitan keuangan, stres dan masalah kesehatan mental, penurunan kepercayaan diri dan penurunan keterampilan; pada masyarakat yaitu peningkatan ketidaksetaraan, penurunan kualitas hidup; pada perekonomian yaitu penurunan konsumsi, penurunan penerimaan pajak, peningkatan biaya sosial dan kesehatan.
2. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di berbagai bidang antara lain kebijakan fiskal dan moneter, peningkatan investasi asing, promosi investasi, kebijakan perdagangan dan industri, pengembangan UKM, pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan asli Indonesia, program pelatihan dan ketrampilan, peningkatan sistem pendidikan, pemberian kartu prakerja bagi pekerja yang telah diputuskan hubungan kerjanya, pemberian jaminan terhadap tenagakerjaan yang diputuskan hubungan kerjanya (PHK), kebijakan ketenagakerjaan.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. "Pengertian Pengangguran: Penyebab, Dampak Dan Jenis Pengangguran." *Gramedia.Com*. Last modified 21021. <https://www.gramedia.com/literasi/pengangguran/>.
- Dewita Hia, Yulna. "Government Strategies and Policies in Tackling Unemployment." *Economica* 1, no. 2 (2018): 208–213.
- Dewita Hia, Yulna. "Government Strategies and Policies in Tackling Unemployment." *Economica* 1, no. 2 (2018): 208–213.
- Dikko Alrahman, Didik Susetyo, Taufiq Taufiq, Azwardi Azwardi. "Effect of Economic Growth on Unemployment Rate in Indonesia." *Bircu* 5, no. 2 (2022). [https://bircjournal.com/index.php/birci/article/view/4811#:~:text=Results the study found that,effect on the unemployment rate](https://bircjournal.com/index.php/birci/article/view/4811#:~:text=Results%20the%20study%20found%20that,effect%20on%20the%20unemployment%20rate).
- Fitra Rizal¹, Haniatul Mukaromah². "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Akibat Pandemi Covid-19." *1st Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies (AICOMS)* 1 (2021).
- Indonesia, CNN. "Pengertian Pengangguran, Jenis-Jenis, Penyebab, Dan Dampaknya." *CNN*. Last modified 2023. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230309113817-569-922817/pengertian-pengangguran-jenis-jenis-penyebab-dan-dampaknya>.
- Marlini Septi. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Akibat Pandemi Covid 19." *International Conference on The Teaching of English and Literature* 1, no. 1 (2020): 46–50.
- Marlini Septi. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Akibat Pandemi Covid 19." *International Conference on The Teaching of English and Literature* 1, no. 1 (2020): 46–50.
- Nurrahman, Agung. "Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran Di Indonesia." *Jurnal Registratie* 2, no. 1 (2020): 1–8.
- Nurrahman, Agung. "Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran Di Indonesia." *Jurnal Registratie* 2, no. 1 (2020): 1–8.
- PHI-JSK. "Pemerintah Antisipasi Penambahan Pengangguran Di Masa Pandemi Covid-19." *Kemnaker RI*. Last modified 2020. <https://kemnaker.go.id/news/detail/pemerintah-antisipasi-penambahan-pengangguran-di-masa-pandemi-covid-19>.